

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KOTA DEPOK



2025

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK
BAGIAN PEMERINTAHAN DAN KERJASAMA
TAHUN 2026



RINGKASAN
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
(RLPPD) KOTA DEPOK
TAHUN 2025

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah merupakan dasar hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintahan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang kemudian pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 13 Tahun 2019.

Berdasarkan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa Kepala daerah menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah RLPPD kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian LPPD kepada Pemerintah Pusat. Kepala daerah wajib mempublikasikan RLPPD kepada masyarakat melalui media cetak dan/atau media elektronik. Selanjutnya, masyarakat dapat memberikan tanggapan atas RLPPD kepada kepala daerah sebagai bahan masukan perbaikan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Depok menyusun ringkasan LPPD untuk memberikan informasi kepada masyarakat.



1. Capaian Kinerja Makro

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Adapun indikator makro tersebut terdiri dari :

- 1) Indeks Pembangunan Manusia
- 2) Persentase Penduduk Miskin
- 3) Tingkat Pengangguran Terbuka
- 4) Pertumbuhan Ekonomi
- 5) PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)
- 6) Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)

Capaian kinerja makro Kota Depok pada tahun 2025 dan tahun 2024 serta laju kinerja masing - masing adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1.

Capaian kinerja makro Kota Depok pada tahun 2025

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2024	Capaian Kinerja Tahun 2025	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	83.05	84,04	1.19%
2	Persentase Penduduk Miskin	2.34	2.31	- 0.03 %
3	Tingkat Pengangguran Terbuka	6.27	6.52	0,25%
4	Pertumbuhan Ekonomi	5.47	5.50	0.03%
5	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB)	43.514	46.686	7.29%
6	Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio)	0.398	0.475	0.077

Sumber data : BPS Kota Depok, (data diolah) 2026



a. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran untuk mengukur capaian pembangunan kualitas hidup manusia. IPM Kota Depok Tahun 2025 adalah sebesar 84,04 mengalami peningkatan dari tahun 2024 sebesar 0,99 poin atau 1,19 persen dari nilai IPM tahun 2024 yaitu sebesar 83,05. Kenaikan IPM ini didorong oleh naiknya nilai komponen-komponen penyusun IPM, yaitu Usia Harapan Hidup, Rata-Rata Lama Sekolah, Harapan Lama Sekolah dan Pengeluaran perkapita yang Disesuaikan.

Nilai IPM Kota Depok merupakan tertinggi ketiga di Provinsi Jawa Barat setelah Kota Bandung (84.66) dan Kota Bekasi (84.43). Hal ini menunjukkan semakin baiknya kualitas pembangunan manusia di Kota Depok baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kelayakan hidup.

b. Angka Kemiskinan

Persentase penduduk miskin adalah persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Angka ini menunjukkan tingkat kemiskinan di suatu wilayah yang dapat disebabkan oleh kelangkaan pemenuhan kebutuhan dasar dan sulitnya akses terhadap Pendidikan dan pekerjaan. Untuk mengukur angka kemiskinan di Kota Depok digunakan angka persentase penduduk miskin Kota Depok yang bersumber dari BPS Kota Depok. Perhitungan angka kemiskinan dilakukan BPS dengan menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2025. Rumus perhitungan persentase penduduk miskin Kota Depok adalah jumlah penduduk Kota Depok yang hidup di bawah garis kemiskinan (yang didapat berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional) dibagi jumlah total penduduk Kota Depok dikali 100 persen. Garis Kemiskinan (GK) mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Pada Maret 2025, GK Kota Depok Adalah Rp884.663/kapita/bulan.



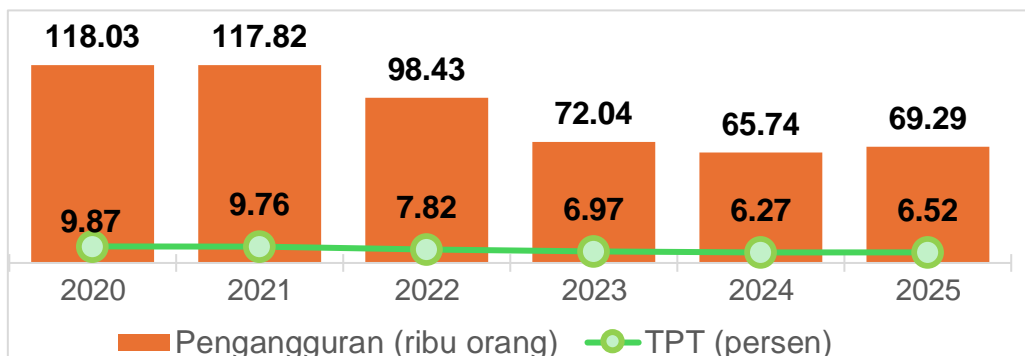
Angka Kemiskinan Kota Depok Tahun 2025 sebesar 2.31%. Nilai ini turun sebesar 0,03 poin atau sebesar -1,28 % dari tahun 2024 yaitu sebesar 2.34%. Tingkat kemiskinan di Kota Depok masih merupakan yang terendah di Provinsi Jawa Barat dan peringkat 4 terendah di level Nasional, di bawah Kota Denpasar (2.16%), Kota Balikpapan (1.97%) dan Kab. Badung (1.9%).

c. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angka pengangguran dapat diukur dengan menggunakan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran dapat menimbulkan beberapa permasalahan perekonomian seperti berkurangnya pendapatan masyarakat, berkurangnya produktivitas hingga meningkatnya angka kemiskinan. TPT hasil Sakernas Agustus 2025 sebesar 6,52 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar enam hingga tujuh orang penganggur. Pada Agustus 2025, TPT mengalami peningkatan sebesar 0,25 persen poin dibandingkan dengan Agustus 2024 (6,27 persen). Semakin tinggi nilai TPT di suatu daerah artinya semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan di daerah tersebut.

Gambar 1.1.

Jumlah dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok, 2020–2025

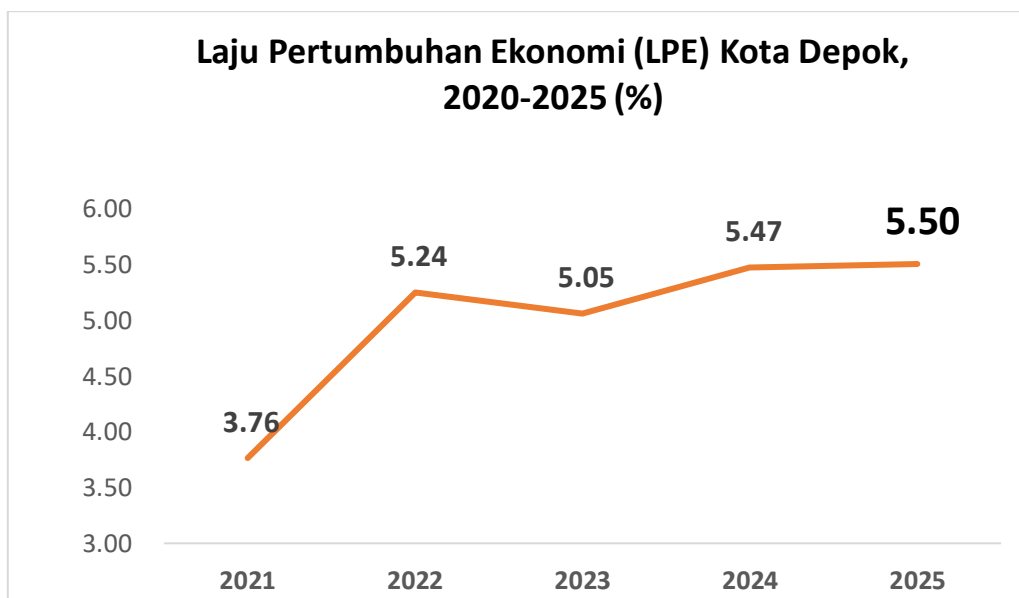


d. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah proses peningkatan produksi barang dan jasa secara berkelanjutan dalam suatu wilayah atau negara. Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diukur berdasarkan laju pertumbuhan produk domestik regional bruto atas dasar harga konstan tahun berjalan dan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kota Depok tahun 2025 sebesar 5,50%, naik dibandingkan dengan capaian tahun 2024, terjadi kenaikan sebesar 0,03 %. Namun demikian capaian pada tahun 2025 belum dapat melampaui target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Depok, yaitu sebesar 5,58%. Meskipun demikian, angka laju pertumbuhan ekonomi di Kota Depok ini masih lebih tinggi dibandingkan LPE Provinsi Jawa Barat (5,20%) dan LPE nasional (5,04%).

Gambar 1.2.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Depok Tahun 2021-2025 (%)



Sumber: BPS Kota Depok (Maret 2026, data diolah)

e. Pendapatan Perkapita

Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan yang dimiliki penduduk suatu wilayah. Pendapatan per kapita



merupakan indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB per kapita Kota Depok pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp46.686.100, meningkat dibandingkan capaian tahun 2024 yang sebesar Rp43.514.520. Capaian tersebut juga telah melampaui target yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 sebesar Rp44.040.000. Berdasarkan perhitungan terhadap perkembangan tersebut, laju pertumbuhan PDRB per kapita Kota Depok pada tahun 2025 tercatat sebesar 7,29 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

f. Ketimpangan Pendapatan

Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan pendapatan yang diterima masyarakat sehingga distribusi pendapatan tidak merata. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah global yang dapat menghambat pembangunan ekonomi. Ketimpangan pendapatan bisa disebabkan oleh inflasi tinggi dan angka kemiskinan yang tinggi. nilai Gini Ratio Kota Depok pada tahun 2025 tercatat sebesar 0,475 (masuk dalam kategori ketimpangan sedang). Jika dibandingkan dengan angka pada tahun 2024 yaitu sebesar 0,398 maka terjadi peningkatan gini ratio sebesar 0,077 poin, sementara target gini ratio pada Perubahan RKPD Kota Depok Tahun 2025 adalah sebesar 0,391 poin.

2. Ringkasan Capaian Kinerja Urusan Pelayanan Dasar

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, Gambaran capaian indikator kinerja kunci hasil (outcome) Pemerintah Kota Depok dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, selama tahun 2025 dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Capaian Indikator Kinerja Kunci Hasil (IKK Outcome)

No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1.	Pendidikan	1.a.1	Persentase anak usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan anak usia dini	99,49%	Dinas Pendidikan	
		1.a.2	Persentase anak usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	99,21%	Dinas Pendidikan	
		1.a.3	Persentase anak usia 7-18 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	96,65%	Dinas Pendidikan	
		1.a.4	Persentase toilet Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	81,72%	Dinas Pendidikan	
		1.a.5	Persentase Ruang Kelas Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama dalam kondisi baik	84,23%	Dinas Pendidikan	
2.	Kesehatan	1.b.1	Persentase kematian ibu	0,07%	Dinas Kesehatan	
		1.b.2	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	4,24%	Dinas Kesehatan	
		1.b.3	Persentase pelayanan kesehatan ibu hamil sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.4	Persentase pelayanan kesehatan ibu bersalin sesuai standar	99,94%	Dinas Kesehatan	
		1.b.5	Persentase pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.6	Persentase pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.7	Persentase pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.8	Persentase pelayanan kesehatan pada usia produktif sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.10	Persentase pelayanan kesehatan penderita hipertensi sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.11	Persentase pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.12	Persentase pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa berat sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.13	Persentase pelayanan kesehatan orang terduga Tuberkulosis sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
		1.b.14	Persentase pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) sesuai standar	100%	Dinas Kesehatan	
3.	Pekerjaan Umum dan	1.c.1	Persentase kondisi irigasi kewenangan kabupaten/kota	1,56%	Dinas Pekerjaan Umum dan	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
	Penataan Ruang				Penataan Ruang	
		1.c.2	Persentase kemantapan jalan kabupaten/kota	90,11%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.3	Persentase peningkatan jumlah penduduk yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan terlindungi dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap jumlah penduduk di kabupaten/kota	99,81%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.4	Persentase jumlah rumah yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	92,26%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.5	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian dan mitigasi banjir	27,14%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.6	Persentase peningkatan perlindungan kawasan permukiman sepanjang pantai kewenangan kabupaten/kota	100%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		1.c.7	Persentase kepatuhan Persetujuan Bangunan Gedung kabupaten/Kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.8	Persentase Persetujuan Bangunan Gedung untuk masyarakat berpenghasilan rendah	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.9	Persentase tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	73,85%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		1.c.10	Persentase penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sudah diterbitkan di kabupaten/kota	100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.d.1	Persentase warga negara korban bencana kabupaten/kota yang memperoleh rumah layak huni	99,45%	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		1.d.2	Persentase luas kawasan permukiman kumuh di bawah 10 Ha yang ditangani	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		1.d.3	Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	3,69%	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		1.d.4	Persentase perumahan yang sudah dilengkapi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	
5	Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1.e.1	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	33,33%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		1.e.2	Persentase penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.e.3	Persentase peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang ditegakkan	100%	Satuan Polisi Pamong Praja	
		1.e.4	Persentase warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		1.e.5	Persentase jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
		1.e.6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	76,44%	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	
6.	Sosial	1.f.1	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		1.f.2	Persentase penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		1.f.3	Persentase lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		1.f.4	Persentase gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	100%	Dinas Sosial	
		1.f.5	Persentase korban bencana alam, sosial dan/atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota	100%	Dinas Sosial	
		1.f.6	Persentase penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	100%	Dinas Sosial	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						
1	Tenaga Kerja	2.a.1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	100%	Dinas Tenaga Kerja	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		2.a.2	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (Peraturan Perusahaan/ Peraturan Kerja Bersama, Lembaga Kerja Sama Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan).	44,72%	Dinas Tenaga Kerja	
		2.a.3	Persentase pekerja bukan penerima upah dan atau pekerja rentan yang mendapatkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan	99,30%	Dinas Tenaga Kerja	
2	Perlindungan Perempuan dan Anak	2.b.1	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.b.2	Persentase perempuan korban kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang mendapatkan layanan komprehensif	100%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
3	Pangan	2.c.1	Persentase jumlah cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	23,41%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
4	Pertanahan	2.d.1	Persentase Ditetapkannya hak atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	8,90%	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		2.d.2	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	84,25%	Dinas Perumahan dan Permukiman	
		2.d.3	Persentase Rencana Detail Tata Ruang yang sudah dilegalkan	100%	Dinas Perumahan dan Permukiman	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
5	Lingkungan Hidup	2.e.1	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan Hidup (PUU LH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	33,73%	Dinas Lingkungan Hidup	
		2.e.2	Persentase jumlah sampah yang tertangani	68,28%	Dinas Lingkungan Hidup	
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.f.1	Persentase akta kelahiran yang diterbitkan	98,38%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.2	Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	90,10%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.3	Persentase data profil kependudukan yang disusun dan dipublikasikan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.4	Persentase kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik	99,80%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.5	Persentase akta kematian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.6	Persentase akta perkawinan yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		2.f.7	Persentase akta perceraian yang diterbitkan bagi yang melaporkan	100%	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.g.1	Persentase pengentasan desa tertinggal	Tuntas Hasil 100%	Sekretariat Daerah	Kota Depok tidak memiliki desa
		2.g.2	Persentase peningkatan status desa mandiri	Tuntas Hasil 100%	Sekretariat Daerah	
		2.g.3	Persentase fasilitasi kerja sama desa	Tidak Dapat Dilaksanakan	Sekretariat Daerah	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
8	Pengendalian Penduduk dan KB	2.h.1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per Wanita Usia Subur usia 15-49 Tahun	101,53%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.h.2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)	60,13%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
		2.h.3	Persentase kebutuhan ber- Keluarga Berencana yang tidak terpenuhi (unmet need)	62,19%	Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
9	Perhubungan	2.i.1	Konektivitas Kabupaten/Kota	0,74	Dinas Perhubungan	
		2.i.2	Volume/Capacity Ratio di Jalan Kabupaten/Kota	0,73	Dinas Perhubungan	
		2.i.2	Persentase Jumlah perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	2,25%	Dinas Perhubungan	
10	Komunikasi dan Informatika	2.j.1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.j.2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	69,57%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		2.j.3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
11	Koperasi dan UKM	2.k.1	Persentase pertumbuhan volume usaha koperasi	84,38%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		2.k.2	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	43,35%	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
12	Penanaman Modal	2.1.1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	-33,55%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
		2.1.2	Realisasi total terhadap target investasi	92,20%	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
13	Kepemudaan	2.m.1	Persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	1,53%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		2.m.2	Persentase partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	67,71%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		2.m.3	Persentase atlet yang berasal dari kabupaten/kota yang masuk Pemusatan Latihan Daerah Provinsi	8,48%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		2.m.4	Persentase jumlah atlet berprestasi	42,11%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
14	Statistik	2.n	Persentase kepatuhan daftar data yang dilaporkan kepada wali data berdasarkan kesepakatan forum satu data daerah	85,21%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
15	Persandian	2.o	Persentase tingkat kematangan keamanan siber dan sandi Pemerintah Daerah	58,50%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
16	Kebudayaan	2.p.1	Persentase jumlah warisan budaya yang dilestarikan	100%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		2.p.2	Persentase peningkatan jumlah masyarakat yang mengunjungi pusat seni dan pusat sejarah	16,67%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
17	Perpustakaan	2.q.1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca (TKM) masyarakat	57,25 Nilai	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2.q.2	Indeks Pembangunan Literasi	2,41 Nilai	Dinas Kearsipan dan	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
			Masyarakat (IPLM)		Perpustakaan	
18	Kearsipan	2.r	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional	73,29%	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
URUSAN PILIHAN						
1.	Perikanan dan Kelautan	3.a.1	Produksi perikanan tangkap dan budidaya	101,08%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
		3.a.2	Angka konsumsi ikan (Kg/Kap/Th)	49,34 Kg/Kapita/Tahun	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
2.	Pariwisata	3.b.1	Persentase investasi sektor penyediaan akomodasi, makan, minum	45,57%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		3.b.2	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan asing	-20,21%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
		3.b.3	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	5,78%	Dinas Pemuda Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata	
3	Pertanian	3.c.1	Peningkatan produksi tanaman pangan	-7,18%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
		3.c.2	Peningkatan produksi hortikultura	35,84%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
		3.c.3	Peningkatan produksi komoditas peternakan	0,86%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	
		3.c.4	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS))	100%	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan	



No.	Urusan Pemerintahan	No. IKK	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
4	Perdagangan	3.f	Persentase Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	70,97%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
5	Perindustrian	3.g.1	Pencapaian sasaran pembangunan industri daerah, meliputi: 1. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 2. Kontribusi sektor industri pengolahan nonmigas terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota; 3. Jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota; 4. Nilai ekspor sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota 5. Nilai investasi sektor industri pengolahan nonmigas kabupaten/kota	34,87%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		3.g.2	Persentase kepatuhan pelaku usaha industri kecil dan menengah yang melaporkan informasi melalui Sistem Informasi Industri Nasional	35,61%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		3.g.3	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kabupaten/kota	23,48%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	
		3.g.4	Persentase realisasi investasi sektor industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	27,08%	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	

Sumber data: Bagian Pemerintahan dan Kerja Sama Setda Kota Depok, diolah 2025

Penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kota Depok diukur melalui 121 indikator kinerja kunci hasil (outcome) sebagaimana yang tersedia dalam Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Gambaran capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kota Depok tahun 2025 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar; terhadap 41 indikator kinerja kunci yang diukur terdapat 17 indikator yang capaiannya sudah mencapai 100%, namun masih terdapat 2 indikator yang capaiannya "0" yaitu pada bidang urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, indikator "Rasio luas



kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan kab/kota dan Rasio luas daerah irigasi kewenangan kab/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi. Indikator kinerja dengan capaian 0 ini, dikarenakan Kota Depok tidak bersinggungan wilayah pantai dan daerah saluran irigasi.

- b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar; terhadap 46 indikator kinerja kunci yang diukur terdapat 8 (delapan) indikator yang capaiannya sudah mencapai 100%, namun masih terdapat 4 indikator yang capaiannya 0 yaitu pada indikator "Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee, indikator Tersedianya tanah untuk masyarakat, indikator Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi, indikator Persentase pengentasan desa tertinggal, serta indikator Persentase peningkatan status desa mandiri". Hal ini dikarenakan Kota Depok tidak memiliki Tanah Obyek Landreform dan tanah garapan. Disamping itu, Kota Depok juga tidak memiliki Desa.
- c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan; Pemerintah Kota Depok melaksanakan 6 (enam) urusan pilihan yang terdiri dari urusan kelautan dan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan perdagangan, urusan perindustrian dan urusan transmigrasi. Sedangkan, untuk urusan kehutanan dan urusan energi sumber daya mineral tidak dilaksanakan di Kota Depok. Terhadap 18 indikator kinerja kunci yang diukur, terdapat 6 (enam) indikator yang capaiannya sudah mencapai 100%, namun masih terdapat 4 indikator yang capaiannya 0 yaitu pada urusan energi sumber daya mineral dan urusan transmigrasi. Hal ini dikarenakan di Kota Depok tidak memiliki energi panas bumi serta kawasan transmigrasi.



3. Hasil EPPD Dan Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

a. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat EPPD adalah evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Pasal 25 ayat (2) menyatakan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melakukan EPPD berdasarkan LPPD kabupaten/kota dengan melibatkan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait untuk menilai Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada PP 13 Tahun 2019 pasal 26 menyatakan EPPD terdiri atas evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Evaluasi makro ini dilakukan dengan menilai capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD dan perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro LPPD. Selanjutnya pada PP 13 Tahun 2019 pasal 29 menyatakan bahwa Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilakukan dengan menilai capaian indikator kinerja. Penilaian capaian indikator kinerja didasarkan pada bobot nilai per bidang urusan pemerintahan dan bobot capaian kinerja indikator per bidang urusan pemerintahan. Bobot nilai tersebut ditetapkan oleh Menteri berkoordinasi dengan menteri teknis dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang membidangi masing-masing urusan pemerintahan. Berdasarkan hasil EPPD, Menteri menetapkan peringkat Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara nasional yang terdiri atas:

1. peringkat kinerja provinsi;
2. peringkat kinerja kabupaten; dan
3. peringkat kinerja kota.



RLPPD tahun 2024 ini dilaporkan bersamaan dengan Pelaporan LPPD Tahun 2024 yang dilaporkan pada Tahun Anggaran 2025 ini. Hasil LPPD Tahun 2024 ini akan disampaikan capaian kinerjanya pada tahun 2026. Sedangkan untuk capaian kinerja LPPD Tahun 2023 yang dilaporkan Tahun Anggaran 2024, belum dipublikasi hasilnya karena masih menunggu Keputusan Menteri Dalam Negeri Tentang Penetapan Peringkat & Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional. Rencana publikasi capaian kinerja tersebut disampaikan pada Hari Ulang Tahun Otonomi Daerah pada Tanggal 25 April 2025 nanti.

Tabel 3.1
 Hasil EPPD Kota Depok dari Tahun 2017-2024

Tahun EPPD	Dasar Hukum	Nilai	Status
2017	SK Mendagri Nomor 118 – 8840 TAHUN 2018	3,2858	Sangat Tinggi
2021	SK Mendagri Nomor 100.2.1.3-1109 Tahun 2023	2,59	Rendah
2022	SK Mendagri Nomor 100.2.1.7-6646 TAHUN 2023	2,9928	Rendah
2023	SK Mendagri NOMOR 100.2.1.7 - 2109 TAHUN 2025	2,6038	rendah
2024	Belum keluar		

Sumber: Data diolah Bagian Pemerintahan Kota Depok, 2025

b. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Provinsi Jawa Barat telah melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Depok selama 14 (sebelas) tahun terakhir. Hal ini didasari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.. Berdasarkan hasil Audit atas Laporan Keuangan Daerah Kota Depok oleh BPK RI 14 Tahun terakhir didapatkan hasil opini



sebagai berikut:

Tabel 3.2
 Hasil Audit Laporan Keuangan Daerah Kota Depok Tahun 2011-2024

No.	Uraian	Predikat
1	Opini BPK atas LKD Tahun 2011	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2	Opini BPK atas LKD Tahun 2012	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
3	Opini BPK atas LKD Tahun 2013	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
4	Opini BPK atas LKD Tahun 2014	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
5	Opini BPK atas LKD Tahun 2015	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
6	Opini BPK atas LKD Tahun 2016	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
7	Opini BPK atas LKD Tahun 2017	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
8	Opini BPK atas LKD Tahun 2018	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
9	Opini BPK atas LKD Tahun 2019	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
10	Opini BPK atas LKD Tahun 2020	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
11	Opini BPK atas LKD Tahun 2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
12	Opini BPK atas LKD Tahun 2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
13	Opini BPK atas LKD Tahun 2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
14	Opini BPK atas LKD Tahun 2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : Badan Keuangan dan Aset Daerah 2026

4. Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Anggaran Daerah

Pada Tahun Anggaran 2025, seperti tertuang dalam APBD, Target Pendapatan Daerah Kota Depok ditargetkan sebesar Rp4.537.174.477.189,93 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran sebesar Rp4.345.528.047.087,00 atau mencapai 95,78%.

Rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kota Depok Tahun 2025 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel 4.1
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Pemerintah Daerah Kota Depok
Tahun 2025

Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
1.	PENDAPATAN DAERAH				
1.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH	2.401.140.967.914,93	2.245.623.942.021,00	(155.517.025.893,93)	93,52
1.1.1.	Hasil Pajak Daerah	2.078.460.982.843,50	1.909.281.833.739,00	(169.179.149.104,50)	91,86
1.1.2.	Hasil Retribusi Daerah	264.522.012.713,00	263.201.628.101,00	(1.320.384.612,00)	99,50
1.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	22.089.910.672,00	22.089.910.672,00	-	100,00
1.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.068.061.686,43	51.050.569.509,00	14.982.507.822,57	141,54
1.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.136.033.509.275,00	2.099.904.105.066,00	(36.129.404.209,00)	98,31
1.2.1.	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	1.822.160.629.800,00	1.789.911.894.642,00	(32.248.735.158,00)	98,23
1.2.1.1.	a. Pendapatan Bagi Hasil Pajak	137.004.402.800,00	121.098.093.300,00	(15.906.309.500,00)	88,39
1.2.1.2.	b. Pendapatan Bagi Hasil Bukan Pajak	24.175.260.000,00	20.830.007.000,00	(3.345.253.000,00)	86,16
1.2.1.3.	c. Pendapatan Dana Alokasi Umum	1.157.909.471.000,00	1.157.799.021.550,00	(110.449.450,00)	99,99
1.2.1.4.	d. Pendapatan Dana Alokasi Khusus	503.071.496.000,00	490.184.772.792,00	(12.886.723.208,00)	97,44
1.2.2.	Transfer dari Pemerintah Pusat – Lainnya	6.837.475.000,00	6.837.475.000,00	-	100,00
1.2.2.1.	a. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
1.2.2.2.	b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
1.2.2.3.	c. Insentif Fiskal	6.837.475.000,00	6.837.475.000,00	-	100,00
1.2.3.	Transfer Pemerintah Provinsi	307.035.404.475,00	303.154.735.424,00	(3.880.669.051,00)	98,74
1.2.3.1.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	303.092.683.987,00	299.335.106.924,00	(3.757.577.063,00)	98,76
1.2.3.2.	Bantuan Keuangan	3.942.720.488,00	3.819.628.500,00	(123.091.988,00)	96,88
1.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	-	-	-	-
1.3.1.	Pendapatan Hibah	-	-	-	-
1.3.2.	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-
1.3.4.	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-
	JUMLAH	4.537.174.477.189,93	4.345.528.047.087,00	(191.646.430.102,93)	95,78
2.	BELANJA DAERAH				
2.1.	BELANJA OPERASI	3.492.802.447.512,70	3.211.802.618.445,45	(280.999.829.067,25)	91,95
2.1.1.	1. Belanja Pegawai	1.520.444.871.686,70	1.361.423.795.348,00	(159.021.076.338,70)	89,54
2.1.2.	2. Belanja Barang dan Jasa	1.789.021.258.326,00	1.684.683.907.880,45	(104.337.350.445,55)	94,17
2.1.3.	3. Belanja Bunga	-	-	-	-
2.1.4.	4. Belanja Subsidi	50.000.000,00	971.250,00	(49.028.750,00)	1,94



Nomor Urut	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/ Berkurang	
		Anggaran	Realisasi	SELISIH (Rp.)	%
1	2	3	4	5 = 4-3	6
2.1.5.	5. Belanja Hibah	124.853.817.500,00	120.954.743.967,00	(3.899.073.533,00)	96,88
2.1.6.	6. Belanja Bantuan Sosial	58.432.500.000,00	44.739.200.000,00	(13.693.300.000,00)	76,57
2.2.	BELANJA MODAL	1.097.710.667.064,60	930.578.119.261,55	(167.132.547.803,05)	84,77
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	264.116.248.310,60	157.722.851.041,00	(106.393.397.269,60)	59,72
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	254.389.411.069,00	223.217.079.596,55	(31.172.331.472,45)	87,75
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	201.748.876.442,00	198.202.349.214,00	(3.546.527.228,00)	98,24
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	367.182.744.243,00	341.727.136.290,00	(25.455.607.953,00)	93,07
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	10.273.387.000,00	9.708.703.120,00	(564.683.880,00)	94,50
2.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	33.111.782.550,00	13.817.875.287,00	(19.293.907.263,00)	41,73
2.3.1.	Belanja Tidak Terduga	33.111.782.550,00	13.817.875.287,00	(19.293.907.263,00)	41,73
2.4.	BELANJA TRANSFER	-	-	-	-
2.4.2.	Belanja Bantuan Keuangan	-	-	-	-
	JUMLAH	4.623.624.897.127,30	4.156.198.612.994,00	(467.426.284.133,30)	89,89
	SURPLUS/(DEFISIT)	(86.450.419.937,37)	189.329.434.093,00	275.779.854.030,37	(219,00)
3.	PEMBIAYAAN				
3.1.	PENERIMAAN DAERAH	224.404.034.779,37	224.404.034.779,37	-	100,00
3.1.1.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	224.404.034.779,37	224.404.034.779,37	-	100,00
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Piutang Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH	224.404.034.779,37	224.404.034.779,37	-	100,00
3.2.	PENGELUARAN DAERAH	137.953.614.842,00	137.953.614.842,00	-	100,00
3.2.1.	Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	137.953.614.842,00	137.953.614.842,00	-	100,00
3.2.3.	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-
	JUMLAH	137.953.614.842,00	137.953.614.842,00	-	100,00
	JUMLAH PEMBIAYAAN BERSIH	86.450.419.937,37	86.450.419.937,37	-	100,00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(0,00)	275.779.854.030,37	275.779.854.030,37	

Sumber: BKD Kota Depok Tahun 2025 (Unaudited)



5. Inovasi Daerah

Pada dasarnya, inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan Pelayanan Publik. Harapannya dengan adanya inovasi daerah kinerja pemerintah daerah berikut pelayanan publiknya dapat menunjukkan peningkatan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Usulan inovasi daerah tidak hanya untuk Pemerintah Daerah saja melainkan juga dibuka bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah. Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi Daerah dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, yaitu inovasi tata kelola Pemerintahan Daerah, inovasi Pelayanan Publik, dan/atau Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, penerapan inovasi daerah dilakukan penilaian dan pemberian penghargaan oleh Menteri kepada Pemerintah Daerah atau oleh Pemerintah Daerah kepada individu dan Perangkat Daerah yang Inovasi Daerahnya berhasil diterapkan. Berikut ini daftar inovasi daerah Pemerintah Kota Depok tahun 2025:

Tabel. 5.1

Persentase Perangkat Daerah Yang Menerapkan Inovasi Dan Telah Menjadi Bagian Dari Program Kegiatan Kota Depok Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	JUMLAH PRODUK INOVASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI BAGIAN PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN	JUMLAH PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	2	2	100	Judul Inovasi: 1. Sistem Informasi Harga Komoditas 2. Sistem Informasi Harga Komoditas
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan	4	4	100	Judul Inovasi: 1. SILONDO BERMULA 2. GLADIS TIKTOK (Gebyar



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	JUMLAH PRODUK INOVASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI BAGIAN PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN	JUMLAH PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sipil				Layanan DISdukcapil Tingkat Kecamatan se-koTa depOK 3. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima (Sanpel De Prima) Kecamatan 4. De Fast (Drive Thru Pengambilan Dokumen Cepat)
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	3	100	Judul Inovasi: 1. Sistem Pengelolaan Layanan TIK (SIMPATIK) 2. Depok Single Window (Solusi Pusat Layanan dan Informasi Kota dalam Satu Aplikasi di Smart Phone) 3. Pusat Data Terintegrasi Kota Depok (Data Warehouse)
4	Dinas Kesehatan	4	4	100	Judul Inovasi: 1. Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) Kota Depok 2. JAPRI KITA (JAngan takut PeRiksa gigi, Kontrol gigit seTiAp 6 bulan Sekali) 3. Lalapan Depok (Kelas Pelatihan Pangan Aman Online) Kota Depok 4. Putus Rantai TB (Putra TB)
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	1	1	100	Judul Inovasi: SIMONAS - Sistem Informasi Monitoring dan Aset
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	7	7	100	Judul Inovasi: 1. Ngakak (Ngobrol Kecil Tapi Asik) Bareng Duta Genre Kota Depok 2. Sekolah Pra Nikah 3. Konsuling Edukasi Club (KECE) 4. Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak 5. Layanan Keluarga Cerdas Inovatif RW Ramah Anak (LAYAR CERIA) 6. Sekolah Ayah Bunda 7. Sistem Konseling dan Edukasi (SI-KONDE)
9	Dinas Pendidikan	3	3	100	Judul Inovasi: 1. SISTEM INFORMASI SMART EDUCATION DEPOK (SISEDEP) 2. E-Hisos (Elektronik Hibah dan Bansos) 3. IKADAS (Implementasi Kecakapan Abad Dua Satu) dalam meningkatkan Berpikir Kritis dan Kolaboratif siswa)



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	JUMLAH PRODUK INOVASI PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI BAGIAN PROGRAM DAN ATAU KEGIATAN	JUMLAH PRODUK INOVASI YANG DIHASILKAN OLEH PERANGKAT DAERAH	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Sekretariat Daerah	2	2	100	Judul Inovasi: 1. SIMANDA (Sistem Manajemen Data Pengadaan) 2. Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik
11	RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA)	1	1	100	Judul Inovasi: EDURELAKS POLI RSUD
18	Kecamatan Cimanggis	1	1	100	Judul Inovasi: Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan Barcode Google Fom
21	Dinas Tenaga Kerja	1	1	100	Judul Inovasi: SIMPEL KEPOK (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kerja Depok)
27	Kecamatan Tapos	1	1	100	Judul Inovasi: Gerai UMKM Kecamatan Tapos
31	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1	1	100	Judul Inovasi: Aplikasi Kinerja Mobile (KMOB)
JUMLAH					

Sumber Data: Bapperida Kota Depok 2026



Tabel. 5.2
 Rincian Data Produk Inovasi Yang Dihasilkan Oleh Perangkat Daerah
 Kota Depok Tahun 2025

NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Digital	Sistem Informasi Harga Komoditas (2023)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
2	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SILONDO BERMULA (2023)	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINIS TRASI KEPENDUDUKAN / PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN INFORMASI ADMINIS T RASI KEPENDUDUKAN	
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Sistem Pengelolaan Layanan TIK (SIMPATIK) (2023)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
4	Dinas Kesehatan	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Kampung Peduli Tuberkulosis (KAPITU) Kota Depok (2023)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN / Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
5	Dinas Perumahan dan Permukiman	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan	Digital	SIMONAS - Sistem Informasi Monitoring dan Aset (2023)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
		Daerah				
6	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	GLADIS TIKTOK (Gebyar Layanan DISdukcapil Tingkat Kecamatan se-koTa depOK) (2023)	PROGRAM PENCATATAN SIPIL / Pelayanan Pencatatan Sipil	
7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prima (Sanpel De Prima) Kecamatan (2023)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Non Digital	Ngakak (Ngobrol Kecil Tapi Asik) Bareng Duta Genre Kota Depok (2023)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) /	
9	Dinas Pendidikan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SISTEM INFORMASI SMART EDUCATION DEPOK (SISEDEP) (2023)	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN / Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
10	Sekretariat Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan	Digital	SIMANDA (Sistem Manajemen Data Pengadaan) (2023)	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN / Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
		Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah				
11	RSUD Khidmat Sehat Afiat (KiSA)	Inovasi pelayanan publik	Digital	EDURELAKS POLI RSUD (2023)	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN / Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
12	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Sekolah Pra Nikah (2023)	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks) / Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Inovasi pelayanan publik	Digital	De Fast (Drive Thru Pengambilan Dokumen Cepat) (2023)	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK / Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Konsuling Edukasi Club (KECE) (2023)	Program Perlindungan Khusus Anak	
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Depok Single Window (Solusi Pusat Layanan dan Informasi Kota dalam Satu Aplikasi di Smart Phone) Tahun 2023	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
16	Dinas Pendidikan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	E-Hisos (Elektronik Hibah dan Bansos) 2023	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN / Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
17	Dinas Pendidikan	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	IKADAS (Implementasi Kecakapan Abad Dua Satu) dalam meningkatkan Berpikir Kritis dan Kolaboratif siswa) 2023	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN / Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
18	Kecamatan Cimanggis	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dengan menggunakan Barcode Google Form (2023)	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK / Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	
19	Sekretariat Daerah	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	Survei Kepuasan Masyarakat Elektronik (2023)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA / Penataan Organisasi	
20	Dinas Komunikasi dan Informatika	Inovasi pelayanan publik	Digital	Pusat Data Terintegrasi Kota Depok (Data Warehouse) (2023)	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA / Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
21	Dinas Tenaga Kerja	Inovasi Daerah lainnya sesuai dengan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah	Digital	SIMPEL KEPOK (Sistem Informasi Manajemen Pelatihan Kerja Depok) (2023)	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA / Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
22	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Mpok Tati dan Bang Patut melaksanakan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya pada Posyandu se-Kota Depok	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN / Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	
23	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Anak	Program Pemenuhan Hak Anak / Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia	
24	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok	Inovasi pelayanan publik	Digital	Layanan Keluarga Cerdas Inovatif RW Ramah Anak (LAYAR CERIA)	Program Pemenuhan Hak Anak	
25	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	Inovasi pelayanan publik	Non Digital	Sekolah Ayah Bunda	Program Perlindungan Khusus Anak / Pengembangan KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) perlindungan khusus anak tingkat daerah	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				kabupaten/kota	
26	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	JAPRI KITA (Jangan Takut Periksa Gigi, Kontrol Gigi Setiap 6 Bulan Sekali)	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan / Pelaksanaan Sehat Dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
27	Kecamatan Tapos	Inovasi Daerah Lainnya Sesuai Dengan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah	Non Digital	Gerai UMKM Kecamatan Tapos	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik / Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Yang Dilimpahkan Kepada Camat	
28	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Lalapan Depok (Kelas Pelatihan Pangan Aman Online) Kota Depok	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat / Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
29	Dinas Kesehatan	Inovasi Pelayanan Publik	Non Digital	Putus Rantai TB (Putra TB)	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat / Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM Dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
30	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana	Inovasi Pelayanan Publik	Digital	Sistem Konseling Dan Edukasi (SI-KONDE)	Program Perlindungan Khusus Anak	



NO	PERANGKAT DAERAH PELAKSANA	BENTUK PRODUK INOVASI	JENIS PRODUK INOVASI	NAMA PRODUK INOVASI	PROGRAM DAN KEGIATAN	KET
31	Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inovasi Tata Kelola Pemerintahan Daerah	Digital	Aplikasi Kinerja Mobile (KMOB)	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH / Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi Kepegawaian ASN	

Sumber Data: Bapperida Kota Depok 2026

Berbagai inovasi tersebut menunjuk komitmen Pemerintah Kota Depok dalam melakukan langkah – langkah terobosan dalam rangka mewujudkan *good governance* serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Depok.